

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Badan Pengelola Rumah tanpa Uang Muka Terbentuk pada April

Anggota DPRD mempertanyakan dasar pembentukan badan layanan tersebut.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA—Pemerintah DKI Jakarta menargetkan badan layanan umum daerah (BLUD) untuk proyek rumah tanpa uang muka terbentuk pada April mendatang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Agustino Darmawan, mengatakan BLUD akan bertugas membuat kebijakan sekaligus mengelola rumah down payment (DP) nol rupiah tersebut. "Sekarang sudah penyelesaian," kata dia kemarin.

Agustino menjelaskan, badan layanan merupakan penyaring awal permohonan kredit rumah DP nol rupiah. Prosesnya mulai dari pemeriksaan dokumen sampai pengecekan tempat tinggal calon pembeli. Setelah lolos seleksi badan layanan, kata dia, permohonan kredit akan diter-

uskan ke perbankan.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Panji Virgianto, sebelumnya mempersoalkan rencana pemerintah DKI membentuk BLUD untuk rumah DP nol rupiah. Panji menilai pembentukan BLUD itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. "Apa ada dasar hukumnya dikelola BLUD?" Menarik dia, pengelolaan rumah tanpa uang muka seharusnya diserahkan ke Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Agustino merjamin, melalui BLUD, seleksi permohonan kepemilikan rumah tanpa uang muka akan lebih ketat ketimbang seleksi penghuni rumah susun sederhana sewa yang semula ditujukan

bagi warga Jakarta yang tergesur. Seleksi ketat, kata dia, untuk memastikan calon pembeli rumah DP nol rupiah belum pernah memiliki hunian tetap. Selain itu, calon pembeli harus terdaftar sebagai warga Jakarta minimal lima tahun dan berpenghasilan minimal Rp 7 juta.

Pembeli rumah susun DP nol rupiah, menurut Agustino, akan memiliki unitnya selama 20 tahun setelah melunasi cicilan, dengan sertifikat hak guna bangunan. Hak itu bisa diperpanjang sampai jangka waktu tertentu. Unit rumah susun hanya boleh dijual kembali atas izin Dinas Perumahan.

Proyek pertama hunian tanpa uang muka berupa rumah susun berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Penggarap proyek adalah Perusahaan Daerah Sarana Jaya. Perusahaan pelat merah tersebut memulai pembangunan pada pertengahan Januari lalu.

Rumah susun bernama Klapa Village itu dibangun dalam dua tower setinggi-

20 lantai. Total ada 703 unit rusun, dengan rincai 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Unit rumah susun tipe 36 berisi dua kamar yang dijual Rp 320 juta. Adapun tipe 21 dengan satu kamar harganya Rp 185 juta.

Di Roetan, Jakarta Utara, rumah DP nol rupiah akan berupa rumah tapak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan PT Nusa Kirana menyiapkan lahan seluas 1,3 hektare untuk membangun 100 rumah tapak. "Karena sudah ada lahannya (swasta), jadi mudah-mudahan tidak memiri inflasi harga tanah di sana," kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, program rumah DP nol rupiah akan mengurangi selisih permintaan dan pasokan rumah atau *backlog* di Ibu Kota yang mencapai 300 ribu unit. Ia optimis dalam waktu lima tahun program rumah DP nol rupiah juga bisa menciptakan 50-60 ribu lapangan kerja.

● LINDA HAIRANI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Badan Pengelola Rumah tanpa Uang Muka Terbentuk pada April

Jatah yang Berpenghasilan Rendah?

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Damawan, mengalakan program rumah tanpa uang muka ditujukan bagi warga Ibu Kota berpenghasilan Rp 7-10 juta per bulan. Syarat itu dibuat agar pemohon kredit memiliki rumah *down payment* (DP) nol rupiah sanggup membayar cicilan mereka.

Di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, misalnya, rumah susun DP nol rupiah tipe 36 dijual Rp 320 juta, sedangkan unit tipe 21 dihargai Rp 185 juta. Dengan harga seperti itu, menurut Agustino, cicilan tipe 36 diperkirakan Rp 2,1 juta per bulan. Adapun cicilan unit tipe 21 sekitar Rp 1,4 juta per bulan.

Berikut ini persyaratan umum pengajuan kredit rumah DP nol rupiah:

- Telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
- Belum memiliki rumah dan tak pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan hunian.
- Calon pembeli harus berpenghasilan Rp 7-10 juta per bulan.
- Memegang surat keterangan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dari pengurus RT, RW, dan lurah setempat.
- Memiliki masa kerja atau usaha minimal satu tahun.
- Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau surat pemberitahuan (SPT), tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

● LINDA HARANI